


Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis

Michael Reskiantio Pabubung¹
¹ Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia
E-mail: michael.pabubung@uajy.ac.id¹

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 01-07-2022	Direview: 26-08-2022	Publikasi: 30-04-2023

Abstrak

Kehadiran kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) telah mengubah banyak sistem dalam lini kehidupan. Hal yang paling nyata adalah buramnya privasi lantaran penerapan sistem AI dalam beragam lini kehidupan sehingga kebebasan dan hak atas hidup privat sebagai salah satu elemen dari martabat manusia melemah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara etis masalah AI dalam perjumpaan dengan manusia sebagai pengembang, pengguna (dan objek) di zaman sekarang ini khususnya dampak terhadap martabat manusia. Penelitian ini adalah bagian dari keterlibatan untuk turut serta berfilsafat secara kontekstual dengan menginterupsi dan mengoreksi laju perkembangan secara etis, sekaligus mengantisipasi permasalahan-permasalahan di masa depan khususnya yang menyangkut martabat manusia. Penelitian ini menjalankan tugas pokok filsafat sebagai interuptor dan induk segala ilmu (*mater scientiarum*). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui analisis literatur, penulis sampai pada kesimpulan bahwa kecerdasan buatan di satu sisi telah memberikan banyak manfaat dalam kehidupan manusia modern. Namun, besarnya manfaat yang diberikan menyisakan sebuah tantangan besar perihal dampak terhadap martabat manusia sebagai elemen paling mendasar dalam diskusi mengenai kemanusiaan. Dalam Etika, sudah merupakan syarat mutlak bahwa manusia harus selalu menjadi tujuan dalam setiap perkembangan dan kemajuan, termasuk perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kata Kunci: etika; kecerdasan buatan (AI); kesetaraan; martabat manusia; privasi

Abstract

Artificial intelligence (AI) has changed many systems in the various elements of life. The most obvious thing is the blurring of privacy due to the application of AI systems in various lines of life where freedom and the right to private life as one element of human dignity are weakened. This study aims to ethically examine the problem of AI in encounters with humans as developers, users (and objects) in today's era, especially the impact on human dignity. This research was a form of philosophizing contextually by interrupting and correcting the pace of development ethically, while anticipating future problems especially on human dignity. This research carries out the main task of philosophy as the interrupter and as the mother of all sciences (*mater scientiarum*). By using qualitative research methods through literature analysis, the author could conclude that artificial intelligence, on the one hand, provides enormous benefits in modern human life. However, the magnitude of the benefits leaves a significant challenge regarding the impact on human dignity as the essential element in discussions about humanity. In ethics, it is an absolute requirement that humans must always be the the end in every development and progress, including the development of artificial intelligence technology.

Keywords: artificial intelligence (AI); equality; ethics; human dignity; privacy

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang disandingkan dengan *Internet of Things* (IoT) telah mengubah pola pikir, tindakan, dan aktivitas harian manusia (Girasa, 2020). Perubahan yang terjadi bagaikan arus deras yang terjadi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya sehingga timbul disrupsi yang juga mengubah

cara pandang dan tingkah laku masyarakat di era kecerdasan buatan ini. Tidak mengherankan jika sering terdengar frasa disrupsi AI atau disrupsi kecerdasan buatan (Girasa, 2020; Pabubung et al., 2021). Disrupsi adalah keniscayaan yang terjadi manakala suatu temuan baru mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak lama. Menurut Girasa (2020), disrupsi akan semakin terasa jika temuan atau gagasan baru itu memasuki dunia pasar. Dalam dunia pasar, persaingan menjadi hal yang pasti. Dalam dunia kecerdasan buatan, disrupsi dalam dunia pasar akan tampak melalui persaingan antara manusia dan teknologi kecerdasan buatan itu sendiri dalam melakukan suatu pekerjaan dengan kalkulasi untung-rugi bagi perusahaan atau pemberi kerja. Dalam disrupsi, kecemasan dan ketakutan sudah menjadi hal yang pasti. Dengan sendirinya, banyak pekerjaan akan digantikan oleh mesin-mesin cerdas. Namun, profesi-profesi baru juga sudah menunggu di depan mata. Tinggal dibutuhkan upaya dan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang yang ada.

Akan tetapi, disrupsi kecerdasan buatan bukan hanya soal lapangan kerja dan tenaga kerja. Di tengah arus deras perkembangan teknologi kecerdasan buatan, ada masalah umum yang selalu muncul yakni mengenai penggunaan sistem AI secara bertanggung-jawab. Permasalahan ini merujuk pada adanya pertimbangan moral dalam setiap pengembangan AI dalam korelasinya dengan kehidupan manusia. Disrupsi kecerdasan buatan juga menyangkut bagaimana manusia zaman sekarang memandang penting privasi sebagai elemen esensial dalam hidup sebagai manusia yang punya martabat (*dignity*).

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memberi dampak positif dan negatif bagi hidup manusia secara keseluruhan (Cath et al., 2018; Roberts et al., 2021). Meski demikian, tak dapat disangkal bahwa temuan yang memukau ini menyisakan sejumlah tantangan yang berkaitan langsung dengan hidup manusia (Pabubung, 2021). Bagian dari hidup manusia yang paling rentan terhadap perkembangan AI yang tidak disertai dengan etika berteknologi yang sejati adalah martabat manusia (Matthias, 2020). Manusia rentan dan mudah terluka oleh AI dan itu sifatnya tak kasat mata dan tidak menyerang secara fisik (Kateb, 2011).

Kehadiran AI mengubah banyak sistem dalam lini kehidupan, termasuk yang paling dekat yakni sistem perekonomian, pendidikan, ketenagakerjaan, dan pemerintahan. Banyak orang akan kehilangan pekerjaannya, serta muncul kecemasan di kalangan kaum muda yang belum siap untuk menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan baru yang menuntut sesuatu yang lebih, lantaran penerapan AI dalam dunia kerja. Akan lahir kelas-kelas ekonomi dan sosial baru, serta tercipta jurang-jurang sosial karena ketidaksetaraan akses terhadap AI (Girasa, 2020). Hal yang juga tak kalah mendesak ialah pola pikir dan cara bertindak manusia zaman sekarang terhadap dimensi-dimensi tak kasat mata, yakni martabat manusia di mana otonomi, kebebasan, dan privasi bersemayam (Kateb, 2011). Tanpa tanggapan serius, privasi, kebebasan, dan otonomi warga negara akan menjadi kabur lantaran penerapan sistem *facial recognition* (Kateb, 2009; Leong, 2019).

Tujuan utama dari kajian ini adalah memberi sumbangan pemikiran etis terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh AI khususnya mengenai martabat manusia. Penelitian ini hendak menjawab sebuah pertanyaan penting: bagaimana dampak kecerdasan buatan terhadap eksistensi martabat manusia jika disorot dari sudut pandang yang etis? Penelitian ini sangat relevan untuk menanggapi kebutuhan global kontemporer khususnya dalam cara hidup yang semestinya di zaman AI (Herzfeld, 2002). Relevansi terhadap kebutuhan global ini berefek pada dua pihak (1) pengguna teknologi, dan (2) para pengembang dan pengambil keputusan. Para pengguna bisa disadarkan untuk semakin peka terhadap sisi positif dan negatif AI yang berdampak bagi kehidupan sebagai manusia, bahkan tidak bisa lepas dari kehidupan. Maka, dibutuhkan kebijaksanaan tertentu untuk menilai dan mengambil sikap, khususnya berkaitan dengan martabat manusia yang semestinya selalu dipelihara. Selanjutnya, para pengembang (*developer*) bisa disadarkan untuk selalu menempatkan dimensi-dimensi humanitas sebagai tujuan dalam segala karya mereka. Itu artinya, dimensi etis dalam setiap kemajuan harus selalu mendapat prioritas (Pabubung et al., 2021). Para pengambil kebijakan pun diharapkan bisa mempertimbangkan otonomi, kebebasan, dan privasi setiap warga negara sebagai elemen dasar dalam topik tentang hak-hak manusiawi (*human rights*), serta tidak memantik ancaman keamanan dan menciptakan tirani baru atas dasar kontrol AI (Ryan, 2020).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis literatur. Tulisan ini mengkaji *artificial intelligence* sebagai objek material dan martabat manusia dari sudut pandang Ilmu Etika sebagai objek formal. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai jurnal dan buku

yang relevan dengan kecerdasan buatan dan martabat manusia. Selain dari buku dan jurnal, penelitian ini juga akan menggunakan berita-berita pada berbagai media terkait kasus-kasus yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber dari berbagai media, khususnya media elektronik terpercaya baik itu diterbitkan secara nasional, maupun terlebih terbitan internasional. Dari sumber-sumber ini, penulis memperoleh informasi dan gagasan dari para penulisnya atau dewan redaksi. Selanjutnya penulis akan menganalisis dan menyintesis ragam informasi dan pandangan yang ada untuk menciptakan gagasan baru sekaligus menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini, yakni bagaimana kecerdasan buatan bisa berdampak pada martabat manusia.

Peneliti mengumpulkan data penelitian yang berupa artikel jurnal, buku-buku, dan berita dari beragam media yang sifatnya *purposive*. Tujuannya adalah untuk mengkaji asumsi yang sudah ada yakni adanya dua kutub antara yang menolak dan menentang kecerdasan buatan. Metode ini dimaksudkan untuk membenarkan atau mengoreksi asumsi yang sudah ada, sekaligus membenarkan atau mengoreksi asumsi yang ada dalam penelitian ini. Alur gagasan ini akan ditata dalam tiga poin pokok sebagai bagian penjabaran dari tema besar martabat manusia dan kecerdasan buatan. Susunan gagasan ini merupakan metode analisis dan sintesis peneliti. Proses penyusunan alur gagasan ini menyertakan secara komprehensif *reduction-display* untuk menghasilkan sintesis dan kesimpulan sebagai bagian pokok dari alur gagasan peneliti (bdk. Sugiyono, 2011).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kecerdasan Buatan

Istilah "*Artificial Intelligence*" akan dikaitkan dengan nama John McCharty (1927-2011). Ia adalah *computer scientist* yang awalnya mengajar matematika di MIT dan Stanford University. Pada tahun 1956, ia menyelenggarakan proyek penelitian di Dartmouth University yang berlangsung selama sepuluh minggu. Ia menyebut proyek tersebut sebagai sebuah "*study of artificial intelligence*". Itulah kali pertama istilah "*artificial intelligence*" digunakan. Tujuan dari studi AI kala itu sangatlah ambisius (Taulli, 2019): "Studi ini dimaksudkan untuk meningkatkan basis perkiraan bahwa setiap aspek pembelajaran (*learning*) atau segala bentuk lain dari kecerdasan (*intelligence*) pada prinsipnya dapat disimulasikan oleh mesin. Sebuah upaya akan dibuat untuk menemukan bagaimana agar mesin-mesin bisa berbahasa, membentuk konsep dan abstraksi, menyelesaikan beragam permasalahan, dan meningkatkan (*improve*) dirinya sendiri."

Sesungguhnya, AI terkenal sangat sulit untuk didefinisikan. Luasnya istilah ini memungkinkan banyaknya kemungkinan yang bisa dicakupnya, mulai dari intensif data teknik-teknik *machine learning* seperti *neural networks* hingga sampai pada model dasar logika deduksi; mulai dari penggunaan teknik statistik hingga penggunaan model psikologis (Ashri, 2020). Di Amerika Serikat (The Senate of the United States, 2018), AI didefinisikan sebagai (1) Segala sistem buatan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan di bawah lingkungan yang beragam dan tak menentu tanpa pengawasan manusia, atau segala sistem yang dapat belajar dari pengalaman dan meningkatkan performanya ketika terarah pada serangkaian data. (2) Sebuah sistem buatan yang dikembangkan dalam perangkat lunak komputer, perangkat keras fisik (*physical hardware*), atau konteks lain yang menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan persepsi, pemahaman, perencanaan, pembelajaran, komunikasi, atau tindakan fisik layaknya manusia. (3) Sebuah sistem buatan (*artificial*) yang didesain untuk berpikir dan bertindak layaknya manusia, termasuk *cognitive architectures* dan *neural networks*. (4) Serangkaian teknik, termasuk *machine learning*, yang didesain untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan pemahaman khusus. (5) Sebuah sistem buatan yang dirancang untuk bertindak secara rasional, termasuk sebuah perangkat lunak cerdas atau robot bertubuh yang mencapai tujuan tertentu menggunakan persepsi, perencanaan, pertimbangan, pembelajaran, komunikasi, pengambilan keputusan, dan mampu mengambil tindakan.

AI dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu Artificial Narrow Intelligence (ANI), Artificial General Intelligence (AGI), dan Artificial Super Intelligence (ASI). ANI digambarkan sebagai kecerdasan lemah (*weak intelligence*) karena berkaitan dengan tugas-tugas tertentu yang dapat dilakukannya dengan baik seperti bermain catur melawan pemain catur kelas dunia, membuat prediksi pasar, melakukan auto-kemudi, dan juga termasuk pengenalan citra dan ungkapan verbal. Kecerdasan buatan jenis kedua adalah AGI. AGI juga dikenal sebagai "*Strong AI*" atau "kecerdasan buatan setingkat manusia". AGI adalah level lebih tinggi dari perkembangan AI yang mencoba untuk meniru kinerja otak manusia. Meski demikian, pengembangannya masih menuai perdebatan masalah kemampuan tanggung jawab dan "komponen-komponen" lain

yang ada dalam otak manusia. AI jenis ketiga adalah ASI. ASI adalah sebuah karakterisasi futuristik yang mungkin akan terjadi ketika AI telah melampaui kapasitas otak manusia dalam hal kreativitas, keterampilan sosial, dan kebijaksanaan. Pengembangan yang terakhir ini menyajikan tantangan-tantangan unik yang bisa menjadi sangat bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bisa jadi sebaliknya.

Pengembangan robot yang ada pada saat ini masih dalam tahap ANI atau AGI dan harus memenuhi standar *turing test*, yakni apakah “sikapnya” layak untuk manusia atau tidak. Semakin mirip dengan manusia, maka ia lebih condong ke arah AGI (Svityk, 2016). Menurut Tegmark (2017), ASI akan menggunakan kecerdasan super untuk menguasai dunia. Tegmark menduga bahwa belumlah jelas apakah ASI akan membawa pada kendali totalitarian, seperti yang terjadi dalam abad kedua puluh oleh Stalin atau Hitler, ataukah lebih pada daya perorangan (*individual empowerment*). Skenario AI menawarkan ruang lingkup kemungkinan yang sangat luas mulai dari utopia libertarian hingga penghancuran diri (*self-destruction*) oleh manusia sendiri (Tegmark, 2017).

Salah satu elemen penting ketika berbicara mengenai kecerdasan buatan adalah data. Data adalah bahan bakar bagi teknologi kecerdasan buatan (Taulli, 2019). Secara umum, ada empat jenis data, yaitu data terstruktur, data tidak terstruktur, data semi terstruktur, dan data rangkaian waktu (*time-series data*). (1) Data terstruktur biasanya disimpan dalam database terhubung atau *spreadsheet*. Beberapa contoh data terstruktur adalah informasi finansial, nomor keamanan sosial, alamat-alamat, informasi produk, data poin penjualan, nomor-nomor telepon. (2) Data tidak terstruktur (*unstructured data*) adalah informasi yang tidak memiliki format yang dikenal (*predefined formatting*). Beberapa contohnya seperti: gambar-gambar, video, file audio, file teks, informasi jaringan sosial seperti tweet, dan unggahan, dan gambar-gambar satelit. (3) Data semi-terstruktur adalah data yang merupakan hibrid dari sumber terstruktur dan sumber tidak terstruktur. Data semi terstruktur contohnya adalah XML (*Extensible Markup Language*), yang didasarkan pada ragam aturan untuk mengidentifikasi elemen-elemen dari sebuah dokumen. Ada juga JSON (*JavaScript Object Notation*), yang adalah salah satu cara untuk mentransfer informasi pada Web melalui API (*Application Programming Interfaces*). (4) Data rangkaian-waktu (*time-series data*) adalah data yang dapat berupa data terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur. Tipe informasi ini digunakan untuk berinteraksi. Cara ini bisa berupa pengumpulan informasi ketika seorang pengguna masuk ke dalam *website* menggunakan sebuah aplikasi atau bahkan masuk ke dalam *store*. Salah satu tujuan dari data ini adalah untuk mengetahui maksud, keinginan, dan minat para pengguna yang bisa sangat bervariasi (Taulli, 2019).

Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Google, Facebook, Tiktok, Baidu, sangat bergantung pada data. Mengapa? Jawabannya adalah karena data merupakan bahan bakar bagi mekanisme perusahaan *megatech* seperti ini. Negara juga membutuhkan data untuk memajukan cita-cita kesejahteraan seluruh warga negara. Data yang terkumpul akan menjadi sarana untuk pengambilan keputusan negara. Bagi perusahaan, data sangat penting untuk mencari tahu selera pasar dan korelasi konsumsi. Hal ini penting untuk efisiensi produksi dan peningkatan penjualan dan performa layanan. Itu sisi positifnya. Namun demikian, ada sebuah kegelisahan manakala data, pemerintahan, dan bisnis itu berpautan dengan “privasi”.

Apakah data dapat dikumpulkan begitu saja demi kepentingan para elite ekonomi dan politik? Masalah privasi menjadi topik yang hangat dibicarakan manakalah sudah berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain. Ada banyak kejadian di mana privasi telah dilanggar dan itu menyangkut penyalahgunaan data (*data breach*) (Allen, 2015). Beberapa di antaranya, seperti kasus Democratic National Committee (2016) yang menyertakan korban seperti Hillary Clinton, *Myspace* (2016), *Yahoo* (2016), dan *Ashley Madison* (2015). Topik lain adalah mengenai adanya risiko diskriminasi (misalnya diskriminasi algoritma yang mengacu pada ras, kesalahan analisis karena *hoax*, dan adanya rekayasa identitas).

Bukan rahasia lagi bahwa perusahaan-perusahaan berkepentingan dengan (*big*) data. Namun perbincangan mengenai (*big*) data menyisakan tanya mengenai beragam permasalahan seperti: pelanggaran (*data breaches*), diskriminasi (Gillis, 2019), dan analisis yang keliru (Weinhardt, 2020). Masalah privasi saat ini dapat dilihat dari kemungkinan bahwa orang lain bisa lebih tahu banyak hal tentang diri saya ketimbang yang saya sendiri tahu tentang diriku. Analisis big data (*big data analytics*) memungkinkan hal ini terjadi (Weathington, 2017). Hal ini memantik diskusi yang akan diteliti lebih lanjut pada bagian di bawah ini. Benarkah ini sekadar masalah, atau ada kaitannya dengan *martabat* manusia?

b. Martabat Manusia

Menurut The Center for Bioethics and Human Dignity, martabat manusia adalah pengakuan bahwa manusia memiliki nilai intrinsik khusus atas kemanusiaannya dan layak untuk dihargai karena manusia adalah manusia. Rinie Steinmann memberi tiga unsur dasar bagi martabat manusia, yaitu (a) *ontological claim* yang mengacu pada kualitas unik manusia yang tak ternilai harganya, tak tergantikan, dan terdapat dalam diri setiap orang; (b) *dignity of recognition* yang mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap sesama manusia satu dengan yang lain [khususnya dalam hubungan dengan konstitusi negara]; dan (c) *relational claim* yang mengacu pada ide Kantian bahwa negara harus hadir untuk setiap individu di mana manusia (dan nilai-nilai kemanusiaan) harus selalu menjadi tujuan akhir dalam setiap kebijakan (Steinman, 2016).

Konsep mengenai martabat manusia sudah mulai dikenal sejak zaman Romawi Kuno. Pada saat itu, martabat manusia dikenal dengan istilah "dignitas". Dalam pemahaman Romawi Kuno, dignitas adalah bentuk penghormatan atau penghargaan yang diberikan kepada seseorang lantaran peranan sosialnya di tengah masyarakat (Matthias, 2020). Matthias (2020) mengatakan bahwa seringkali martabat (*dignity*) juga mengacu pada kapabilitas atau karakteristik fungsional, tindakan yang dilandasi oleh keutamaan-keutamaan (*virtuous behavior*) hingga juga tingkatan atau derajat tertentu yang dimiliki seseorang dalam hidup di tengah masyarakat. Sering pula perbincangan mengenai martabat manusia menjadi topik karena merupakan landasan bagi adanya hak-hak manusiawi (atau hak asasi manusia / *human rights*). Sudah merupakan hal yang wajib bahwa diskusi mengenai hak asasi manusia perlu selalu menyertakan pembicaraan tentang martabat manusia (Matthias, 2020).

Diskusi tentang martabat manusia tidaklah lengkap jika tidak menyinggung Immanuel Kant sebagai filsuf yang banyak berbicara tentang martabat manusia khususnya dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (2002). Martabat (*dignity*) tidaklah sama dengan harga (*price*). Segala sesuatu mungkin saja bisa dinilai berdasarkan harga, tetapi tidak semuanya bisa dikatakan punya martabat. Menurut Kant, hanya manusialah yang mempunyai *dignity* atau martabat dalam kaitan dengan kapasitas moralnya. Dasarnya adalah otonomi. Dari semua yang ada, hanya manusia yang memiliki otonomi. Hanya manusia yang bisa bebas memilih di antara ragam kemungkinan yang ada. Saat ini kita mengenal adanya automasi, misalnya robot, atau mesin, atau mobil yang sudah mampu untuk mengerjakan sendiri tugas-tugas tertentu tanpa perlu pengawasan dari manusia. Namun, alat-alat ini tidak bisa dikatakan sebagai "yang memiliki otonomi" karena masih melakukan tugasnya sesuai dengan program dan algoritma berdasarkan data yang ada. Hanya manusia yang punya otonomi dan karena itu, hanya manusia jugalah yang punya martabat atau *dignity*. Makhluk lain pun, dalam kacamata Kant, tidak bisa dikatakan memiliki martabat, karena tidak punya otonomi. Seekor anjing atau kucing tidak bisa dituntut atas tindakannya karena memang bukan subjek moral yang tidak punya otonomi dalam bertindak.

Pandangan Kant ini kembali digaungkan oleh seorang profesor dari Princeton yang bernama George Kateb (1931-...), namun dengan nada yang agak berbeda. Bagi Kateb, martabat manusia sejatinya sulit untuk didefinisikan. Namun ia memberi unsur dasar bagi martabat manusia. Baginya, ada dua unsur pokok martabat manusia, yaitu (1) setiap individu setara (*equality*) dan (2) setiap individu istimewa [dalam arti tiada ada (*being*) lain yang nilainya sama dengan kemanusiaan] (Kateb, 2011). Bagi Kateb, ide pokok dari martabat manusia adalah bahwa di dalam planet biru ini, kemanusiaan adalah bentuk ada yang luar biasa (*greatest type of beings*) sehingga tidak ada yang melebihi kemanusiaan itu. Dengan perkataan lain, manusia adalah yang paling mulia. Oleh karena itu, sudah selayaknya martabat manusia itu dipelihara dan dijunjung.

Dignitas setiap individu manusia sifatnya sama dengan individu (manusia) yang lain, yakni bahwa setiap orang punya status yang sama (Kateb, 2011). Oleh karena itu, gagasan tentang dignitas individual harus diterapkan dalam hubungan dengan sesama manusia (Kateb, 2015). Saya hanya bisa menegaskan dignitasku dengan cara memperlakukan orang lain sebagai yang memiliki dignitas yang sama denganku. Aku pun tidak boleh mengklaim dignitas hanya untuk kelompok, ras, suku, atau golonganku saja, tetapi juga untuk semua orang tanpa terkecuali. "*Each person must claim for all, and all for each*" (Kateb, 2011).

Ketika berbicara tentang martabat manusia, Kateb memunculkan istilah "status manusia". Menurutnya, status manusia mengandung kesetaraan semua manusia secara inheren (Kateb, 2015). Status manusia atau status individual menyangkut juga hak-hak manusiawi (*human rights*). Menurut Kateb, prinsip kesetaraan status manusia terjamin manakala negara tidak merusak dignitas setiap individu. Dalam arti ini, negara memperlakukan setiap orang secara

setara. Demikian pun, setiap individu saling menghargai status kemanusiaannya satu sama lain sebagai yang setara. Kesetaraan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hak setiap pribadi bersifat absolut (Kateb, 2015). Poin pokok yang mau diperoleh dari pembelaan ini adalah perlindungan setiap individu. Setiap warga negara wajib saling menghargai satu sama lain dan negara wajib melindungi setiap individu dan kebebasan yang dimiliki. Negara perlu menghargai martabat manusia.

Bagi Kateb, perlu ada keyakinan tertentu bahwa sewaktu-waktu martabat manusia dapat terancam bahkan terluka. Walau demikian, ancaman dan luka eksistensial seringkali tanpa rasa sakit dan derita. Orang-orang dapat dimanipulasi, dikontrol, atau dikondisikan secara halus. Manipulasi dan kontrol ini sering tak kasat mata. Para korban sering merasa baik-baik saja, padahal, menurut Kateb, mereka sedang direndahkan secara eksistensial. Martabat manusia yang luhur menjadi dasar bagi adanya kebebasan, dan setiap warga negara, setiap individu berhak untuk hidup dalam otonominya sendiri tanpa perlu diawasi dan dikendalikan. Dalam konteks pemanfaatan kecerdasan buatan, kamera pengawas (*facial recognition*) bisa dikatakan sebagai alat untuk melindungi karyawan toko dari serangan luar, walau sesungguhnya kamera pengawas itu sedang mengawasi gerak-gerik para pegawai toko sendiri. Data yang kita serahkan pada platform-platform digital dimaksudkan untuk memudahkan koneksi antara diri kita dengan orang lain juga terlebih dengan platform digital yang bersangkutan. Namun, data yang kita serahkan seringkali tidak punya jaminan keamanan sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran privasi. Tidak mengherankan jika banyak yang memperoleh pesan-pesan dari pihak-pihak yang tak dikenal yang tentu saja tidak kita harapkan. Kita sudah sangat biasa menyerahkan data pada beragam platform digital dan seringkali tak peduli dengan keamanan data yang kita serahkan. Padahal ini bisa berdampak buruk di kemudian hari, bahkan juga saat ini ketika kita menyurut martabat manusia. Setiap manusia karena martabatnya yang luhur, berhak untuk tidak diawasi, tidak "dimata-matai", berhak atas hidup privatnya, dan orang lain wajib untuk menghargai kedalaman dan keluhuran martabat setiap manusia. "*Each person must claim for all and all for each*" (Kateb, 2011).

c. Dampak Kecerdasan Buatan terhadap Martabat Manusia

Sepanjang sejarah, perkembangan teknologi telah berdampak pada hidup manusia. Kita mengenal adanya istilah revolusi industri yang mengacu pada suatu perubahan yang cepat dan radikal dalam waktu yang singkat (Setyo et al., 2021). Revolusi Industri 1.0 dengan ditemukannya mesin uap telah membuat manusia bekerja secara lebih cepat dan efisien, mampu bepergian jauh karena dukungan dari temuan baru berupa mesin. Revolusi 2.0 dengan ditemukannya listrik memungkinkan adanya produksi massal. Barang bisa didapatkan dengan mudah dan murah. Hal yang pasti, banyak hal menjadi dimudahkan. Produksi massal semakin dipermudah dengan ditemukannya komputer yang mengawali revolusi 3.0. Di era ini, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan beragam kebutuhan hidup dapat diperoleh dengan mudah. Harganya pun hampir sama. Batas-batas sosial antarnegara semakin menipis karena informasi dari satu tempat ke tempat lain mengalir dengan begitu cepat dengan hadirnya kecanggihan baru bernama komputer. Orang bahkan merasa tidak lagi terikat pada negaranya masing-masing, dalam artian nasionalisme sempit, tetapi sebagai masyarakat dunia (*global citizen*) (Setyo et al., 2021). Kini kita mengenal adanya revolusi 4.0 di mana kecerdasan buatan menjadi komponen penggerak dan pengubah utama. Kerja semakin mudah. Robot-robot bisa membantu pekerjaan manusia yang (hampir) tidak lagi membutuhkan kerja berat karena adanya automasi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jika selama ini petugas administrasi atau *customer service* harus dilayani oleh manusia, kini kecerdasan buatan (AI) bisa mengambil alih peranan itu. Di masa pandemi, kecerdasan buatan semakin memudahkan untuk melacak individu-individu yang positif *Covid-19* seraya memberitahukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan. Hidup juga semakin mudah. Smartphone yang ada di genggaman kita seringkali sudah menjadi asisten pribadi yang kadangkala lebih tahu banyak hal daripada kita sendiri. Beragam aplikasi yang mendiami smartphone kita telah mampu mengingatkan jika lupa berolahraga atau juga menawarkan tempat-tempat yang oleh kebanyakan orang mampu memberikan penyegaran dan inspirasi yang baru. Algoritma-algoritma media sosial pun semakin mampu mengenali penggunaannya dengan menawarkan tampilan-tampilan atau konten-konten yang tidak jauh dari selera setiap penggunanya. Semakin ke sini, algoritma ini semakin canggih, dan dalam arti tertentu semakin "pintar" karena ciri imersif-nya yang mampu menembus sekat-sekat hidup privat penggunanya.

Selain dari dampak positif yang diberikan oleh setiap perkembangan teknologi ini, efek negatif yang seringkali tak kasat mata juga ada. Revolusi Industri 1.0 ternyata telah

menciptakan kelas-kelas baru pengusaha atau kaum borjuis yang memicu terjadinya Revolusi Perancis dan mengubah tatanan politik di Eropa. Revolusi 2.0 pun tak terhindar dari efek negatif. Revolusi Industri 2.0 mengakibatkan jurang kesenjangan sosial yang semakin lebar. Secara tidak langsung, Revolusi Industri 2.0 telah memunculkan ideologi-ideologi besar yang telah berkonflik selama puluhan tahun, yakni pertentangan antara sistem kapitalis vs sistem yang memihak kelas pekerja. Sistem komputerisasi yang menandai masuknya Revolusi Industri 3.0 juga tak dapat mengelak dari dampak negatif yang dibawanya serta. Revolusi 3.0 telah mempercepat arus deras persaingan dan produksi sehingga mengukuhkan sistem kapitalisme liberal dan membuat ambruk sistem komunis (Setyo et al., 2021).

Kini, kita berada di era Revolusi Industri 4.0 di mana kecerdasan buatan menjadi penggerak utama. Sama seperti Revolusi Industri 1.0, 2.0, 3.0, Revolusi Industri 4.0 tak juga luput dari bayang-bayang masalah yang berdampak besar bagi hidup masyarakat pada zaman kita. Revolusi Industri 4.0 ditengarai telah menggerus secara perlahan fondasi sistem demokrasi liberal yang selama ini berdiri kokoh (Setyo et al., 2021). Hal itu terbukti dengan adanya propaganda melalui beragam platform digital. Di Amerika, pembelahan masyarakat menjadi berlarut-larut setelah pilpres (2020) dengan adanya hoaks dan teori konspirasi yang beredar dengan bebas. Hal yang senada pun terjadi di Indonesia. Platform digital seringkali digunakan untuk menggerogoti demokrasi dengan menyuarakan ragam ketidaksenangan pada hasil pemilihan demokratis yang sah. Platform digital yang digerakkan oleh teknologi kecerdasan buatan telah memberi ruang atau bahkan “memfasilitasi” sekelompok kecil orang yang mau menggerogoti demokrasi dan menumbangkan pemerintah yang sah.

Di era kecerdasan buatan ini, tantangan yang paling nyata adalah kolonialisme data dan rezim diktator digital (Setyo et al., 2021). Teknologi kecerdasan buatan menjadi semakin cepat dan bergerak eksponensial dari waktu ke waktu. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antarbangsa yang semakin melebar. Tak semua negara menguasai teknologi kecerdasan buatan ini. Hanya sebagian kecil saja yang menguasainya. Sementara itu, semua negara sangat bergantung pada teknologi baru ini. Untuk bisa maju dalam konteks dunia sekarang, setiap negara harus ikut terlibat dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Kondisi ini menuntut sebagian besar negara-negara menggantungkannya dirinya pada sebagian kecil negara-negara yang unggul dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan ini. Ketergantungan ini membuat sebagian besar negara (dan pada umumnya negara kecil dan miskin) dikendalikan dan didikte negara maju yang adalah pengembang dan pemasok teknologi kecerdasan buatan. Saat ini, data menjadi incaran perusahaan-perusahaan dan negara-negara besar. Data-data negara konsumen dengan sendirinya akan dikuasai oleh negara maju atau perusahaan *megatech*. Para pengguna platform media sosial akan menjadi penyedia data untuk kepentingan tertentu baik oleh negara maupun oleh perusahaan-perusahaan.

Belakangan ini, media sosial sempat dihebohkan dengan adanya skandal Pegasus Project, sebuah *spyware* yang dibuat untuk mengambil data dari telepon pintar (smartphone) pribadi atau oknum-oknum tertentu yang dijadikan target tanpa klik dari sang target (The Guardian, 2021; France 24 English, 2021; Al Jazeera English, 2021). Algoritma *malware* Pegasus lebih menohok dari yang dimiliki oleh perusahaan *megatech* seperti Alphabet (Google) dan Meta (Facebook) karena mampu mengakses apa pun yang ada dalam ponsel seseorang. Jika teknologi ini jatuh ke tangan pemimpin diktator yang berwajah demokratis, maka katastrofi sudah di depan mata. Ia tak lagi menggerus landasan demokrasi melainkan sudah meluluhlantakkan elemen-elemen demokrasi. *Human rights* hanya bisa terlihat samar-samar dan privasi warga negara sepenuhnya luntur dalam pengawasan mata-mata diktator. Dalam situasi seperti ini, orang tidak bisa lagi berbicara tentang kebebasan sebagai hak setiap individu.

Kebebasan dan privasi adalah hal-hal esensial yang ada dalam martabat manusia. Penghargaan terhadap keluhuran martabat manusia mengandung konsekuensi logis bahwa setiap individu manusia harus diperlakukan dengan selayaknya yakni menghargai otonomi yang dimiliki. Dalam pandangan Kateb (2011), otonomi manusia nyata dalam terpeliharanya kebebasan dan hak-hak individu di mana privasi menjadi hak individu paling mendesak untuk saat ini. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang tidak dilandasi dengan pertimbangan etis yang matang dapat melangkahi kaidah-kaidah penghargaan terhadap martabat manusia. Tiadanya regulasi dan sanksi yang jelas akan memperlemah martabat manusia sebagai yang berhak atas kebebasan dan privasi.

4. Simpulan dan Saran

Setiap perkembangan selalu memberi dampak positif tetapi juga tak bisa mengelak dari dampak negatif. Teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) telah memberikan banyak dampak positif. Akan tetapi, teknologi ini juga menyisakan dampak negatif yang kadangkala tidak secara langsung dan tidak kasat mata. Dalam sorotan martabat manusia, kecerdasan buatan sangat berpotensi untuk menghilangkan sekat-sekat hidup privat yang menjadi hak setiap manusia. Ini menyangkut data setiap individu yang sewaktu-waktu bisa disalahgunakan atau diambil tanpa seizin individu bersangkutan. Kecerdasan buatan yang jatuh ke tangan pemimpin diktator dapat melumpuhkan kebebasan yang menjadi konsekuensi logis dari adanya martabat manusia. Negara-negara perlu bangkit bersama untuk menciptakan regulasi dalam memerangi pemanfaatan kecerdasan buatan yang dapat melumpuhkan sendi-sendi martabat manusia. Perusahaan-perusahaan *megatech* juga perlu terbuka dan menyatakan ketegasan untuk taat pada regulasi yang melindungi martabat manusia. Dari sudut pandang etis, martabat luhur manusia harus selalu menjadi bagian pertimbangan utama dalam setiap pengembangan karena pengembangan atau kemajuan (teknologi) itu sendiri memang dimaksudkan untuk kemajuan (kualitas) hidup manusia.

Penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini hanyalah salah satu cara pandang untuk menyorot teknologi kecerdasan buatan dari perspektif etis dengan menggunakan martabat manusia sebagai objek formal. Sebagai penelitian lanjutan, perlu diupayakan kajian lebih mendalam mengenai fenomena pemanfaatan kecerdasan buatan khususnya dalam sistem pemerintahan (*surveillance*) dan dalam perusahaan-perusahaan. Hal ini penting untuk melihat secara lebih fokus masalah aktual yang terjadi di tiap-tiap negara. Akhir kata, kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu penelitian lanjutan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala kritik dan saran.

5. Ucapan Terimakasih

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) yang telah mendukung dan mendanai terlaksananya penelitian ini. Terima kasih kepada LPPM UAJY yang ikut serta memberi bimbingan dan pendampingan bagi penulis untuk menciptakan sebuah karya ilmiah yang kini dapat dibaca oleh pembaca budiman.

6. Daftar Pustaka

- AI Jazeera English. (2021). Pegasus Project: Malware Used against Journalists and Dissidents. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=b6VxWBXuEGM>, 30/06/2022.
- Allen, V. V. (2015). The 18 Most Frightening Data Breaches. *TechRepublic*. <https://www.techrepublic.com/pictures/the-15-most-frightening-data-breaches/>, 30/06/2022.
- Ashri, R. (2020). *The AI-Powered Workplace. How Artificial Intelligence, Data, and Messaging Platforms are Defining the Future of Work*. Apress.
- Cath, C. et al. (2018). Artificial Intelligence and the 'Good Society': the US, EU, and UK approach. *Science and Engineering Ethics*, 24, 505–528. <https://doi.org/10.1007/s11948-017-9901-7>.
- France 24 English. (2021). Pegasus Project: Macron Chairs Emergency Meeting on Spyware. *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=jlpa8SliJ9s>, 30/06/2022.
- Gillis, T. B., & Spiess, J. L. (2019). Big Data and Discrimination. *The University of Chicago Law Review*. Vol. 86, No. 2, Symposium: Personalized Law, 459-488.
- Girasa, R. (2020). *Artificial Intelligence as a Disruptive Technology*. Palgrave Macmillan.
- Herzfeld, N. (2002). Creating in Our Own Image: Artificial Intelligence and the Image of God. *Zygon*, 2(2), 303-316.
- Kant, I. (2002). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Allen W. Wood (ed. and trans.). Yale University Press.
- Kateb, G. (2009). *Patriotism and Other Mistakes*. Yale University Press.
- Kateb, G. (2011). *Human Dignity*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Kateb, G. (2015). *Lincoln's Political Thoughts*. Harvard University Press.

- Leong, B. (2019). Facial Recognition and the Future of Privacy: I Always Feel Like Somebody's Watching Me. *BULLETIN OF THE ATOMIC SCIENTISTS*, 75(3), 109–115. <https://doi.org/10.1080/00963402.2019.1604886>.
- Matthias, A. (2020). Dignity and Dissent in Humans and Nonhumans. *Science and Engineering Ethics*, 26, 2497–2510. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00245-x>.
- Pabubung, M. R. (2021). "Human Dignity" Dalam Pemikiran Yohanes Paulus II Dan Relevansi Untuk Dunia Masa Kini. *Jurnal Teologi*, 10(1), 49–70. <https://doi.org/10.24071/jt.v10i1.2905>
- Pabubung, M. R. et al. (2021). Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152–159. <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i2.34734>.
- Roberts, H. et al. (2021). Achieving a 'Good AI Society': Comparing the Aims and Progress of the EU and the US. *Science and Engineering Ethics*, 27:68. <https://doi.org/10.1007/s11948-021-00340-7>.
- Ryan, M. (2020). In AI We Trust: Ethics, Artificial Intelligence, and Reliability. *Science and Engineering Ethics*, 26, 2749–2767. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00228-y>.
- Svityk, T. (2016). 3 Types of Artificial Intelligence Everyone Knows About. *LETZGRO*. <http://letzgro.net/blog/3-types-of-artificial-intelligence/> (access 07.04.2022).
- Steinmann, R. (2016). The Core Meaning of Human Dignity. *PER / PELJ* 2016(19). <http://dx.doi.org/10.17159/1727-3781/2016/v19i0a1244>.
- Sugiyono, S. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Penerbit Alfabeta.
- Taulli, T. (2019). *Artificial Intelligence Basics. A Non-Technical Introduction*. Apress.
- Tegmark, M. (2017). *LIFE 3.0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence*. Alfred Knopf.
- The Guardian. (2021). *Pegasus: The Spyware Technology that Threatens Democracy*. *YouTube*. <https://www.youtube.com/watch?v=G7H9uo3j5FQ&t=199s>.
- The Senate of The United States. (2018). A Bill to Establish National Security Commission on Artificial Intelligence and for Other Purposes. *115 Congress, 2nd Session*. <https://www.congress.gov/115/bills/s2806/BILLS-115s2806is>.
- Weinhardt, M. (2020). Ethical Issues in the Use of Big Data for Social Research. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 45(3), Special Issue: Social Finance, Impact Investing, and the Financialization of the Public Interest, 342-368.
- Weathington, J. (2017). Big Data Privacy is a Bigger Issue than You Think. *TechRepublic*. <https://www.techrepublic.com/article/big-data-privacy-is-a-bigger-issue-than-you-think/>.
- Setyo, A. et al. (2021). Heidegger Dan Bahaya Teknologi. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(2), 221–242. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/view/15841>.